

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi keuangan (*fintech*) dan proses digitalisasi dalam bidang keuangan telah menciptakan transformasi besar di sistem keuangan, baik di tingkat dunia maupun dalam negeri (Ozili, 2020). Pada masa revolusi industri 4.0 ini, adopsi layanan keuangan digital seperti dompet elektronik, perbankan seluler, dan pembayaran melalui kode QR kian luas, sehingga menggeser cara transaksi tradisional. Kemajuan tersebut bukan hanya meningkatkan efisiensi, melainkan juga memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat, khususnya para pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk mendapatkan akses ke layanan keuangan resmi dan memperluas bisnis mereka.

Selanjutnya *World Bank* (2020) menunjukkan bahwa perkembangan *fintech* di negara berkembang memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan inklusi keuangan, terutama bagi kelompok yang sebelumnya belum terjangkau oleh layanan perbankan tradisional. Namun, pemanfaatan layanan keuangan digital belum merata atau terjadi kesenjangan antar daerah di Indonesia. Contohnya di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, masih terdapat kesenjangan akses dan literasi digital untuk mewujudkan inklusi keuangan yang menyeluruh.

Kesenjangan layanan keuangan digital tercermin dari rendahnya tingkat adopsi layanan keuangan digital di kalangan pelaku UMKM di wilayah non-metropolitan. Kota Sungai Penuh, sebagai salah satu kota di Provinsi Jambi, menghadapi tantangan dalam memperluas pemanfaatan layanan keuangan digital secara merata. Meskipun infrastruktur keuangan digital telah tersedia di kota Sungai Penuh, pemanfaatan keuangan digital masih terkendala dengan rendahnya literasi digital, serta kurangnya pendampingan secara berkelanjutan dari lembaga terkait. Padahal, layanan seperti *mobile banking*, *e-wallet*, dan QRIS berpotensi besar dalam meningkatkan efisiensi usaha, memperluas pasar,

dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (OJK,2023).

Pada kurun waktu 2022 hingga 2024, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Sungai Penuh menunjukkan tingkat perkembangan adopsi teknologi keuangan digital masih rendah dibandingkan dengan nasional. Data inklusi keuangan 2022–2024 menunjukkan dinamika akses layanan keuangan di tingkat nasional, Provinsi Jambi, dan Kota Sungai Penuh. Pada 2022, inklusi nasional 85,1%, Jambi 85,19%, dan Sungai Penuh 72%. Tahun 2023, nasional naik menjadi 88,7%, Jambi turun menjadi 80%, dan Sungai Penuh naik menjadi 75%, mencerminkan peningkatan akses digital oleh UMKM. Meski pada 2024 inklusi nasional turun menjadi 75,02%, Jambi dan Sungai Penuh justru meningkat menjadi 78%. Kenaikan Sungai Penuh dari 72% menjadi 78% dalam tiga tahun menandakan kemajuan bertahap dalam pemanfaatan layanan keuangan digital oleh UMKM, meski masih menghadapi keterbatasan akses yang diperlihatkan pada Tabel 1.1

Tabel 1. 1 Adopsi atau Tingkat Inklusi Keuangan di Indonesia, Provinsi Jambi, dan Kota Sungai Penuh (%) Tahun 2022–2024

Tahun	Inklusi Keuangan (%)		
	Nasional	Jambi	Sungai Penuh
2022	85,1	85,19	72
2023	88,7	80	75
2024	75,02	78	78

Sumber: OJK Nasional, 2024; OJK Jambi, 2024

Sejak 2022, adopsi teknologi keuangan digital di kalangan UMKM Kota Sungai Penuh menunjukkan kemajuan bertahap namun masih terbatas dibandingkan dengan beberapa daerah lain seperti Kota Jambi dan Kota Padang yang tingkat adopsinya telah mencapai lebih dari 65% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan penggunaan layanan digital seperti *e-wallet*, *mobile banking*, dan *QRIS* di Kota Sungai Penuh,

pemanfaatannya masih relatif rendah dan belum seoptimal daerah lain dalam mendukung pengelolaan keuangan dan efisiensi transaksi. Data Dinas Koperasi dan UMKM mencatat bahwa 41% UMKM menggunakan layanan digital seperti *e-wallet*, *mobile banking*, dan QRIS pada 2022, meningkat menjadi 58% pada awal 2024. Peningkatan ini mencerminkan pergeseran perilaku keuangan untuk mendukung efisiensi transaksi, meskipun sebagian besar UMKM masih menggunakan teknologi secara terbatas dan belum terintegrasi penuh dalam pengelolaan keuangan (Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sungai Penuh, 2024).

Pada tahun 2022 tercatat bahwa 41% dari total UMKM telah memanfaatkan layanan keuangan digital seperti *e-wallet*, *mobile banking*, dan sistem pembayaran berbasis QRIS, yang jika diasumsikan dari total 14.000 UMKM menghasilkan sekitar 5.740 unit. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan adopsi dengan estimasi mencapai 50%, sedangkan pada tahun 2024 persentase adopsi meningkat menjadi 58% sehingga menghasilkan sekitar 8.700 UMKM yang telah menggunakan teknologi keuangan digital. Meskipun terdapat tren peningkatan yang terlihat, data ini mengindikasikan bahwa adopsi teknologi keuangan digital masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan total jumlah UMKM yang ada (Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sungai Penuh, 2024). Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut disajikan tabulasi jumlah UMKM yang menggunakan teknologi keuangan digital di Kota Sungai Penuh dari tahun 2022 hingga 2024 pada Tabel 1.2 :

Tabel 1. 2 jumlah UMKM yang mengadopsi *fintech* di Kota Sungai Penuh 2022-2024

Tahun	Total UMKM	Jumlah UMKM yang mengdopsi fintech dalam (%)
2022	14.000	41
2023	14.500	50
2024	15.000	58

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sungai Penuh, 2024

Meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tingkat adopsi teknologi keuangan digital pada UMKM di Kota Sungai Penuh masih relatif rendah apabila dibandingkan dengan daerah yang memiliki tingkat digitalisasi lebih maju seperti DKI Jakarta. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024), tingkat inklusi keuangan di DKI Jakarta telah mencapai lebih dari 90%, dengan sebagian besar pelaku UMKM memanfaatkan layanan pembayaran *digital*, *mobile banking*, *QRIS*, *marketplace*, serta berbagai aplikasi keuangan digital untuk mendukung kegiatan usahanya. Tingginya pemanfaatan teknologi tersebut didukung oleh infrastruktur digital yang memadai, akses internet yang luas, tingkat literasi digital yang lebih tinggi, serta keberadaan ekosistem *fintech* yang berkembang pesat.

Sebaliknya, UMKM di Kota Sungai Penuh masih menghadapi berbagai kendala dalam pemanfaatan teknologi keuangan digital. Rendahnya literasi digital, keterbatasan pemahaman mengenai manfaat layanan keuangan digital, serta kurangnya pendampingan yang berkelanjutan menyebabkan sebagian pelaku UMKM masih mengandalkan sistem transaksi dan pencatatan keuangan secara konvensional. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan digital (*digital divide*) antara daerah yang telah maju secara digital dengan daerah yang masih dalam tahap pengembangan transformasi digital.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi keuangan digital belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Di Jakarta, digitalisasi telah menjadi bagian penting dalam aktivitas usaha sehari-hari yang mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses pembiayaan, mempercepat transaksi, serta meningkatkan daya saing UMKM. Sementara itu, di Kota Sungai Penuh, pemanfaatan teknologi digital masih berada pada tahap perkembangan sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan inklusi keuangan digital dan pemanfaatan teknologi pada UMKM agar mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, dan daya saing di era ekonomi digital.

Selain tantangan dalam penggunaan layanan keuangan digital, inovasi dan pemanfaatan teknologi juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kinerja UMKM di Kota Sungai Penuh. Dalam era Revolusi Industri 4.0, UMKM dituntut tidak hanya beradaptasi dengan sistem keuangan digital, tetapi juga berinovasi dalam produksi, pemasaran, dan manajemen usaha. Digitalisasi menjadi pendorong utama efisiensi dan peningkatan daya saing (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023).

Selain tantangan dalam penggunaan layanan keuangan digital, inovasi dan pemanfaatan teknologi juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kinerja UMKM di Kota Sungai Penuh. Dalam era Revolusi Industri 4.0, UMKM dituntut tidak hanya beradaptasi dengan sistem keuangan digital, tetapi juga berinovasi dalam produksi, pemasaran, dan manajemen usaha. Digitalisasi menjadi pendorong utama efisiensi dan peningkatan daya saing (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Menanggapi kebutuhan digitalisasi UMKM, pemerintah daerah mulai aktif mendorong transformasi digital melalui berbagai program pelatihan dalam dua tahun terakhir. Pemerintah Provinsi Jambi dan Kota Sungai Penuh menginisiasi pelatihan literasi digital, pemanfaatan *e-commerce*, dan penggunaan teknologi dalam operasional usaha. Upaya ini sejalan dengan pandangan bahwa literasi digital merupakan kunci ketahanan dan keberlanjutan UMKM di era digital (Bappenas, 2023).

Salah satu wujud nyata dari dedikasi untuk mengubah UMKM melalui digitalisasi adalah kegiatan pelatihan soal teknologi digital yang berlangsung di bulan Juli 2024. Kegiatan tersebut berhasil mengikutsertakan 150 orang pengusaha kecil dan menengah yang berasal dari Kota Sungai Penuh serta Kabupaten Kerinci (Otodanews, 2024). Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan para pelaku bisnis dalam bidang digital, seperti teknik promosi menggunakan media sosial, pemanfaatan aplikasi untuk mencatat keuangan secara elektronik, dan penerapan sistem pengelolaan persediaan yang menggunakan teknologi. Langkah ini membuktikan bahwa kreativitas dan penerapan teknologi sekarang ini sudah menjadi landasan pokok untuk

menaikkan efisiensi serta kemampuan bersaing UMKM. Dengan adanya bantuan untuk proses digitalisasi di skala lokal, diyakini bisa makin kokohkan peran UMKM sebagai penggerak ekonomi wilayah dan bahkan tingkat nasional (Bank Indonesia, 2023).

Contoh penerapan teknologi terlihat pada UMKM Batik Aksara Incung yang mengadopsi pencatatan akuntansi digital dan merasakan peningkatan efisiensi serta profitabilitas (Nurainun, 2024). Usaha tauge di Desa Sungai Jernih juga memanfaatkan teknologi sederhana dalam Program PKMS untuk meningkatkan kualitas produk. Ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi tidak hanya mendukung keuangan digital, tetapi juga memperluas daya saing, mempercepat distribusi, dan meningkatkan efisiensi usaha. Oleh karena itu, penguatan aspek teknologi harus menjadi fokus dalam membangun ekosistem UMKM yang tangguh di Kota Sungai Penuh.

Melihat kondisi kesenjangan antara pertumbuhan jumlah UMKM dan masih rendahnya pemanfaatan teknologi serta layanan keuangan digital oleh pelaku UMKM di Kota Sungai Penuh, guna meningkatkan kinerja usaha mereka secara signifikan. Meskipun jumlah UMKM terus bertambah setiap tahun, tingkat penggunaan layanan keuangan digital masih berada di bawah rata-rata nasional, yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam akses dan pemanfaatan teknologi tersebut. Kesenjangan ini berpotensi membatasi kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan secara efisien, memperluas pasar, dan meningkatkan produktivitas, sehingga berdampak negatif pada daya saing dan pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara empiris tentang faktor yang mempengaruhi inklusi keuangan digital dan pengaruhnya terhadap kinerja UMKM. Dengan judul Inklusi Keuangan Digital dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UMKM di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikembangkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya inklusi keuangan pelaku UMKM di Kota Sungai Penuh?
2. Bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kota Sungai Penuh?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikembangkan maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Faktor-faktor yang memengaruhi inklusi keuangan pada pelaku UMKM.
2. Pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat dalam aspek teori maupun praktik, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang ekonomi, khususnya mengenai inklusi keuangan digital dan kaitannya dengan kinerja UMKM. Hasil penelitian juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan topik sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pelaku UMKM dalam memanfaatkan layanan keuangan digital untuk mengembangkan usaha. Bagi pemerintah dan pihak terkait, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan inklusi keuangan digital dan kinerja UMKM di Kota Sungai Penuh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Produksi

Teori produksi menguraikan hubungan antara pemanfaatan berbagai faktor produksi dengan jumlah output yang dihasilkan dalam suatu kegiatan ekonomi. Produksi pada dasarnya merupakan proses pengolahan input berupa sumber daya menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai dan manfaat bagi masyarakat. Pemanfaatan faktor produksi secara efektif dan optimal diharapkan mampu menciptakan nilai tambah serta mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi (Sukirno, 2016).

Dalam proses produksi, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi hasil usaha, meliputi sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Sumber daya alam mencakup berbagai sumber yang tersedia dari lingkungan alam dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produksi. Tenaga kerja berkaitan dengan kemampuan fisik dan pemikiran manusia dalam menghasilkan barang maupun jasa. Modal meliputi sumber daya yang digunakan untuk mendukung kegiatan produksi, seperti dana, mesin, peralatan, serta bangunan. Adapun kewirausahaan merupakan kemampuan dalam mengatur dan mengombinasikan berbagai faktor produksi agar kegiatan usaha dapat berjalan secara efektif dan efisien (Boediono, 2014). Selain itu, teori produksi menjelaskan keterkaitan antara input yang digunakan dengan output yang dihasilkan melalui konsep fungsi produksi. Fungsi produksi menggambarkan sejauh mana perubahan dalam penggunaan faktor-faktor produksi dapat memengaruhi jumlah output suatu usaha. Dengan pengelolaan faktor produksi yang semakin efektif, hasil produksi yang diperoleh juga berpotensi mengalami peningkatan (Mankiw, 2021).

Fungsi produksi dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Q=f(K,L,T,E) \quad (2.1)$$

Keterangan:

- Q = output atau hasil produksi
- K = modal (*capital*)
- L = tenaga kerja (*labor*)
- T = sumber daya alam atau tanah (*land*)
- E = kewirausahaan (*entrepreneurship*)

Di samping konsep fungsi produksi, teori produksi juga mencakup *Law of Diminishing Returns* atau hukum hasil marginal yang semakin menurun. Konsep ini menerangkan bahwa ketika salah satu faktor produksi terus ditingkatkan, sedangkan faktor produksi lainnya berada pada jumlah yang tetap, maka setelah mencapai kondisi tertentu, tambahan output yang diperoleh dari penambahan input tersebut akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, peningkatan jumlah input tidak selalu diikuti oleh pertambahan output dalam proporsi yang sama (Mankiw, 2021).

Pada UMKM, teori produksi menunjukkan bahwa pencapaian hasil usaha berkaitan erat dengan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola dan memanfaatkan faktor produksi yang tersedia. Penggunaan teknologi serta layanan keuangan berbasis digital dapat mendukung UMKM dalam memperoleh sumber modal, memudahkan proses transaksi, dan meningkatkan efisiensi kegiatan operasional. Pemanfaatan tersebut pada akhirnya dapat membantu meningkatkan produktivitas dan mendukung pencapaian kinerja usaha yang lebih optimal (Sukirno, 2016).

2.1.2 Teori UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dalam struktur perekonomian karena memiliki kontribusi yang besar terhadap berbagai aktivitas ekonomi. Peran UMKM tidak terbatas pada penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, tetapi juga mencakup peningkatan pendapatan serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemampuan UMKM dalam menjalankan kegiatan usaha di berbagai wilayah menjadikannya sebagai salah satu sektor yang berperan dalam menggerakkan perekonomian daerah maupun nasional (Tambunan, 2019).

Pada dasarnya, UMKM merupakan kegiatan usaha produktif yang dapat dikelola oleh individu ataupun badan usaha dengan skala usaha tertentu sesuai dengan kapasitas dan karakteristik usahanya. Perkembangan UMKM memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan sumber pendapatan secara mandiri, sekaligus berkontribusi terhadap terciptanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi (Tambunan, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kegiatan usaha tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Penggolongan tersebut didasarkan pada beberapa ketentuan, di antaranya nilai kekayaan bersih serta jumlah penjualan atau hasil usaha dalam satu tahun. Kriteria tersebut menjadi salah satu landasan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan, program pembinaan, serta upaya pengembangan UMKM (UU No. 20 Tahun 2008).

Dibandingkan dengan perusahaan berskala besar, UMKM pada umumnya mempunyai karakteristik usaha yang relatif berbeda. Kondisi tersebut dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang cenderung terbatas, pemanfaatan teknologi yang masih relatif sederhana, kebutuhan modal yang lebih kecil, serta pola pengelolaan usaha yang belum terlalu kompleks. Walaupun memiliki keterbatasan tersebut, UMKM dikenal memiliki tingkat fleksibilitas yang cukup tinggi dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha. Kemampuan untuk menyesuaikan produk, kegiatan operasional, dan strategi usaha dengan perkembangan pasar serta

kebutuhan konsumen menjadi salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan UMKM dalam menghadapi berbagai kondisi perekonomian (Tambunan, 2019).

2.1.3 Teori Moneter

Teori moneter merupakan salah satu bidang dalam ilmu ekonomi yang membahas fungsi uang serta keterkaitannya dengan berbagai aktivitas perekonomian. Uang memiliki beberapa fungsi utama, antara lain sebagai media pertukaran, satuan untuk menentukan nilai, alat pembayaran, dan instrumen untuk menyimpan nilai kekayaan. Dengan adanya uang, proses pertukaran barang dan jasa menjadi lebih mudah sehingga kegiatan transaksi ekonomi dapat dilakukan secara lebih lancar dan efisien (Mankiw, 2021).

Dalam perspektif teori moneter, keberadaan sistem keuangan menjadi bagian penting dalam menunjang berlangsungnya kegiatan ekonomi. Sistem keuangan yang berjalan secara efektif dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan transaksi, memperoleh sumber pendanaan, menyimpan uang, serta melakukan pengelolaan keuangan. Kemudahan tersebut pada akhirnya dapat menciptakan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan mendukung perkembangan aktivitas usaha pada berbagai sektor (Mishkin, 2019).

Perkembangan teknologi informasi turut mendorong perubahan dalam sistem keuangan dan transaksi moneter. Perubahan tersebut terlihat dari semakin luasnya penggunaan berbagai layanan keuangan digital, seperti mobile banking, internet banking, uang elektronik, dompet digital, dan sistem pembayaran berbasis digital. Kehadiran berbagai layanan tersebut memungkinkan masyarakat melakukan transaksi secara lebih cepat dan praktis, serta mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan uang tunai dalam kegiatan pembayaran (Mishkin, 2019).

Teori moneter juga menunjukkan bahwa peningkatan kemudahan dalam memperoleh akses terhadap layanan keuangan dapat memperluas kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Akses keuangan yang lebih baik memungkinkan masyarakat maupun pelaku usaha melakukan berbagai aktivitas, seperti melakukan pembayaran, menyimpan dana, memperoleh

pembiayaan, dan mengembangkan kegiatan produktif. Oleh karena itu, ketersediaan dan kemudahan akses terhadap layanan keuangan dapat menjadi salah satu unsur yang mendukung produktivitas serta pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2021). Dalam kegiatan UMKM, layanan keuangan mempunyai kedudukan yang penting karena dapat mendukung berbagai kebutuhan operasional usaha. Pemanfaatan layanan keuangan digital memungkinkan pelaku UMKM melakukan pembayaran dan penerimaan dana, memantau serta mengatur arus kas, hingga memperoleh alternatif pembiayaan untuk menunjang pengembangan usaha. Pemanfaatan layanan tersebut dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan pada akhirnya memberikan dukungan terhadap peningkatan kinerja UMKM (Mishkin, 2019).

2.1.4 Teori Inklusi Keuangan

Teori inklusi keuangan digital adalah teori yang menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam layanan keuangan dapat memperluas akses, meningkatkan penggunaan, dan memperbaiki kualitas layanan keuangan formal bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya UMKM (Demirgüç-Kunt et al., 2018). Teknologi digital mampu mengurangi hambatan geografis, menekan biaya transaksi, serta menyederhanakan proses administrasi yang selama ini menjadi kendala bagi pelaku UMKM dalam mengakses layanan keuangan formal (Gomber et al., 2017).

A. Konsep Inklusi Keuangan Digital

Konsep inklusi keuangan digital menekankan pentingnya partisipasi semua kalangan masyarakat dalam sistem perbankan resmi yang didasarkan pada teknologi modern, melalui penyediaan, jangkauan, dan kemudahan mendapatkan layanan keuangan digital seperti rekening tabungan online, pinjaman elektronik, perlindungan risiko digital, serta metode transaksi yang menggunakan teknologi (Sarma & Pais, 2011). Dalam bidang pengembangan perekonomian, inklusi keuangan digital diyakini bisa menambah kekuatan finansial keluarga dan mendorong majunya bisnis, khususnya bagi kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang sering kali terhalang akses ke lembaga perbankan

digital resmi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa naiknya tingkat inklusi keuangan digital dapat menghasilkan dampak baik, seperti mengurangi jurang ekonomi dan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk terjun dalam kegiatan ekonomi yang bermanfaat (Allen et al., 2016).

Sasaran pokok dari inklusi keuangan berbasis digital adalah untuk menjamin bahwa semua kelompok masyarakat, terutama mereka yang sebelumnya kurang mendapat pelayanan dari sistem perbankan resmi, bisa mendapatkan akses ke layanan perbankan digital yang memadai (Demirgüç-Kunt et al., 2018). Akses semacam ini amat krusial dalam membantu menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta mencapai beberapa target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), seperti menghilangkan kemiskinan, mencapai kesetaraan gender, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lestari serta merata.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan bahwa inklusi keuangan digital mencerminkan suatu kondisi di mana setiap individu memiliki kesempatan yang memadai untuk menggunakan produk dan layanan keuangan berbasis teknologi, termasuk layanan perbankan digital, asuransi digital, pembiayaan digital, dan investasi digital, guna mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik dan produktif (OJK, 2021). Inklusi keuangan digital bukan hanya tentang ketersediaan layanan, tetapi juga mencakup pemanfaatan dan pemahaman yang tepat terhadap layanan tersebut agar dapat mendorong pembangunan ekonomi yang merata.

Dari hasil Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2019, angka inklusi keuangan digital mencapai 76,19%, yang naik cukup besar dibanding tahun 2016 yang hanya 67,8%. Kenaikan tersebut menunjukkan sinergi antara pemerintah, OJK, dan berbagai pihak dalam memperluas akses masyarakat ke layanan perbankan berbasis digital. Survei ini melibatkan 12.773 responden dari 34 provinsi serta 67 kota/kabupaten, dengan mempertimbangkan aspek jenis kelamin dan perbedaan wilayah (urban/rural). Data survei menunjukkan bahwa angka inklusi keuangan digital di daerah kota

mencapai 83,60%, sedangkan di desa hanya 68,49%. Selain itu, ada perbedaan berdasarkan gender, di mana indeks inklusi keuangan digital untuk pria tercatat 77,24%, sementara untuk wanita 75,15%. OJK terus berusaha meningkatkan pengetahuan dan inklusi keuangan digital di tengah masyarakat untuk mencapai sasaran yang ditentukan dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Seiring dengan bertambahnya akses ke layanan keuangan digital, masyarakat diharapkan bisa mendapatkan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Karena itu, inklusi keuangan digital bukan cuma tentang akses, tapi juga tentang kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan berbasis teknologi dengan efektif untuk meningkatkan mutu hidup mereka (OJK, 2019). World Bank Group (2020) menyoroti bahwa inklusi keuangan berbasis digital bukan sekadar soal akses, melainkan juga tentang mutu layanan yang disediakan. Hal penting di sini mencakup perlindungan bagi pengguna, pendidikan tentang keuangan digital, serta penggunaan teknologi untuk memperbaiki akses dan efisiensi layanan keuangan digital. Dengan begitu, inklusi keuangan digital memainkan peran vital dalam membangun sistem perbankan yang lebih merata dan tahan lama, yang akhirnya bisa mendorong kemajuan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Aspek-aspek inklusi keuangan digital meliputi: jangkauan, pemanfaatan, dan mutu layanan keuangan digital. Tabel 2.1 menjelaskan tiga dimensi pokok inklusi keuangan digital, yakni jangkauan, pemanfaatan, dan mutu, yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengetahui seberapa aktif masyarakat terlibat dalam layanan keuangan digital resmi.

Tabel 2.1 Dimensi Inklusi Keuangan Digital

Dimensi	Fokus Utama	Indikator Contoh
Akses	Kemudahan memperoleh layanan keuangan digital, ketersediaan produk dan fasilitas digital	Proporsi orang dewasa dengan rekening digital, jumlah kantor layanan digital/ATM

Dimensi	Fokus Utama	Indikator Contoh
Penggunaan	Tingkat pemanfaatan layanan keuangan digital secara aktif dan berkelanjutan	Frekuensi transaksi digital, penggunaan kredit digital, tabungan digital, pembayaran digital rutin
Kualitas	Mutu produk dan layanan keuangan digital, keamanan, biaya, perlindungan konsumen digital	Kepuasan pengguna, biaya layanan digital, keamanan transaksi digital, kesesuaian produk digital

Sumber: Bank Indonesia, 2022

Dimensi-dimensi dalam inklusi keuangan digital memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan akses keuangan digital yang merata, pemanfaatan layanan secara optimal, serta penyediaan produk keuangan digital yang berkualitas. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah dan lembaga keuangan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa ketiga aspek tersebut terpenuhi, sehingga inklusi keuangan digital dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat (Kementerian Keuangan RI, 2021).

Selanjutnya, inklusi keuangan digital memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan sektor UMKM, karena akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan digital dapat membantu meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kapasitas usaha mereka. Program seperti PROMISE II Impact dirancang untuk memperkuat sistem keuangan digital yang inklusif bagi UMKM, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital guna memperluas jangkauan terhadap pembiayaan, akses pasar, serta sumber daya pendukung lainnya. Oleh karena itu, inklusi keuangan digital menjadi faktor kunci dalam mendorong kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional dan penciptaan lapangan pekerjaan.

B. Faktor-Faktor Inklusi Keuangan

1. Omzet Usaha

Omzet usaha adalah jumlah total penerimaan bruto yang didapat dari

penjualan produk atau layanan dalam jangka waktu tertentu. Semakin besar omzet bisnis, semakin tinggi pula kegiatan perekonomian yang berjalan, yang akhirnya menambah keperluan akan alat pembayaran yang efektif. Keynes (1936) dalam *Theory of Transaction Demand for Money* menyatakan bahwa kebutuhan uang untuk keperluan transaksi sebanding langsung dengan level penghasilan, sehingga UMKM dengan omzet yang lebih tinggi biasanya melakukan transaksi lebih banyak, termasuk yang berbasis digital. Studi Demirgüç-Kunt et al. (2018) juga membuktikan bahwa pengusaha dengan kemampuan ekonomi yang lebih kuat cenderung lebih sering memanfaatkan layanan perbankan resmi. Karena itu, omzet usaha diperkirakan memiliki dampak positif pada volume transaksi digital yang dilakukan UMKM.

2. Jumlah Aplikasi Keuangan Digital Aktif

Jumlah aplikasi keuangan digital aktif mencerminkan tingkat adopsi teknologi keuangan oleh pelaku usaha. Semakin banyak aplikasi yang digunakan, semakin luas pula pilihan saluran pembayaran dan penerimaan pembayaran yang tersedia. Rogers (2003) melalui *Diffusion of Innovations Theory* menjelaskan bahwa adopsi inovasi dipengaruhi oleh kemudahan akses, manfaat yang dirasakan, dan kompatibilitas teknologi dengan kebutuhan pengguna. UMKM yang menggunakan beberapa aplikasi keuangan digital seperti *e-wallet*, *QRIS*, *mobile banking*, atau *internet banking* memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam melakukan transaksi. Hal ini memungkinkan terjadinya peningkatan frekuensi transaksi digital, sehingga variabel ini diduga berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan digital.

2.1.5 Teori Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pertumbuhan UMKM merupakan proses evolusioner yang ditentukan oleh kombinasi peluang pasar, sumber daya yang tersedia, dan kemampuan organisasi untuk beradaptasi (Davidsson 2005). Selanjutnya Churchill dan Lewis (1983) menjelaskan bahwa pertumbuhan UMKM terjadi melalui tahapan-tahapan yang saling berkelanjutan. Setiap tahap mencerminkan tingkat perkembangan usaha yang ditandai oleh meningkatnya kompleksitas organisasi, kemampuan manajerial, serta pengelolaan sumber daya. Seiring dengan

berkembangnya skala usaha, pelaku UMKM dituntut untuk mampu menyesuaikan strategi, sistem pengelolaan, dan pengambilan keputusan agar usaha dapat terus tumbuh dan bertahan secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, terdapat sejumlah tahapan perkembangan usaha yang menggambarkan perjalanan bisnis dari tahap awal pendirian hingga mencapai tingkat kematangan organisasi, yang akan diuraikan secara lebih rinci pada pembahasan selanjutnya.

1. Tahap pertama adalah eksistensi (*existence*), yang merupakan fase awal di mana pelaku usaha berupaya menciptakan produk dan mendapatkan pelanggan. Pada tahap ini, struktur organisasi sangat sederhana dan pemilik terlibat langsung dalam semua aktivitas. Fokus utama berada pada kelangsungan operasional dasar dan pencapaian penjualan awal agar usaha tetap hidup.
2. Tahap kedua, tahap kelangsungan hidup (*survival*) dicapai ketika usaha mulai memperoleh pendapatan tetap, namun masih menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Usaha pada tahap ini masih rentan dan sangat tergantung pada arus kas. Jika manajemen tidak mampu mengatur keuangan secara efisien, maka keberlanjutan usaha dapat terancam.
3. Tahap ketiga, usaha akan masuk ke tahap kesuksesan (*success*), di mana bisnis telah mencapai stabilitas operasional dan mampu menghasilkan keuntungan secara konsisten. Pada fase ini, pemilik usaha dihadapkan pada pilihan untuk tetap mempertahankan bisnis dalam skala saat ini atau mulai melakukan ekspansi. Manajemen mulai terstruktur dan pembagian tugas lebih jelas, seiring meningkatnya kebutuhan efisiensi dan profesionalisme.
4. Tahap keempat jika pemilik memilih untuk mengembangkan usaha, maka akan memasuki tahap lepas landas (*take-off*). Tahap ini ditandai dengan pertumbuhan yang cepat, kebutuhan pendanaan eksternal, dan peningkatan kompleksitas organisasi. Kegagalan dalam mengelola pertumbuhan yang pesat ini dapat menimbulkan tekanan besar pada struktur manajemen dan keuangan usaha (Kurniawati & Ratnawati,

2020).

5. Tahap kelima adalah kematangan sumber daya (*resource maturity*), di mana usaha telah mencapai kemapanan dalam hal struktur organisasi, sistem manajerial, dan efisiensi operasional. Fokus utama pada tahap ini adalah menjaga daya saing dan inovasi agar usaha tetap relevan dan mampu bertahan di tengah dinamika pasar.

Dengan cara pandang yang berkembang secara bertahap ini, jelas bahwa kemajuan usaha kecil dan menengah tidak cuma bergantung pada naiknya penghasilan, melainkan juga pada kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan serta memperkuat struktur dalam perusahaan di tiap fase perkembangannya. Khusus di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, pola perkembangan UMKM benar-benar menunjukkan langkah-langkah yang dijelaskan oleh Churchill dan Lewis. Usaha kecil dan menengah di wilayah tersebut punya peluang besar, khususnya di bidang jual beli, pertanian, serta hasil kerajinan setempat. Meski begitu, sebagian besar pengusaha masih terjebak di tingkat permulaan, yaitu bertahan hidup, di mana mereka kesulitan dengan masalah dana, jangkauan pasar, dan kurangnya pengetahuan tentang keuangan. Sebaliknya, ada beberapa UMKM yang sudah maju dan mulai mencapai tahap keberhasilan serta kemajuan pesat, terutama yang telah mengadopsi alat digital untuk memasarkan produk atau melakukan transaksi.

Penerapan teori ini membantu dalam memahami bahwa tidak semua UMKM berada pada tahap perkembangan yang sama. Oleh karena itu, dukungan kebijakan dan intervensi program, termasuk dalam hal keuangan digital, perlu disesuaikan dengan posisi masing-masing UMKM dalam tahapan pertumbuhannya. Misalnya, UMKM di tahap eksistensi mungkin lebih membutuhkan layanan keuangan digital yang sederhana dan mudah digunakan, seperti dompet digital atau pembukuan berbasis aplikasi mobile.

2.1.6 Teori Akses Keuangan

Teori akses keuangan menjelaskan bahwa ketika individu atau pelaku usaha kecil memiliki akses terhadap layanan keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dan sistem pembayaran mereka dapat meningkatkan kapasitas ekonomi

dan kesejahteraan jangka panjang. Beck, Demirgüç-Kunt, dan Levine (2007) mengemukakan bahwa akses keuangan mencakup tersedianya layanan keuangan secara tepat waktu dengan biaya yang wajar. Pandangan ini menegaskan bahwa akses keuangan bukan hanya soal keberadaan institusi keuangan, tetapi juga menyangkut kemudahan dan keterjangkauan masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut

Teori akses keuangan menggarisbawahi bahwa salah satu hambatan utama dalam pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang, adalah keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, khususnya bagi kelompok ekonomi rendah dan pelaku usaha kecil (Beck et al., 2007). Tanpa akses yang memadai, individu tidak dapat menabung dengan aman, memperoleh pembiayaan untuk kegiatan produktif, atau melindungi diri dari risiko finansial (Demirgüç-Kunt & Levine, 2009). Sebaliknya, peningkatan akses keuangan dapat memperluas partisipasi ekonomi, mengurangi ketimpangan, serta memperkuat sektor UMKM sebagai penggerak utama ekonomi lokal (World Bank, 2014).

Lebih lanjut, Claessens (2006) menjelaskan bahwa terbatasnya akses layanan keuangan dapat membuat masyarakat berpendapatan rendah dan pelaku usaha kecil sulit terlibat dalam aktivitas ekonomi, sehingga memperkuat kondisi kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap layanan keuangan adalah prasyarat penting untuk inklusi sosial dan ekonomi. Ketika individu atau kelompok tidak memiliki akses terhadap bank, kredit usaha, atau layanan pembayaran digital, mereka cenderung terpinggirkan dari arus ekonomi utama, dan kesulitan untuk mengembangkan usaha atau meningkatkan taraf hidup.

Berdasarkan pengamatan peneliti, pelaku UMKM di Kota Sungai Penuh masih menghadapi sejumlah kendala dalam mengakses lembaga keuangan konvensional. Kendala tersebut antara lain disebabkan oleh faktor geografis, keterbatasan informasi, serta minimnya agunan untuk pengajuan kredit. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi keuangan digital (*fintech*), hambatan-hambatan tersebut mulai dapat diatasi. Saat ini, pelaku UMKM di daerah ini mulai memanfaatkan layanan keuangan digital untuk mengakses modal kerja,

mencatat transaksi, hingga menerima pembayaran non-tunai secara lebih mudah dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan akses keuangan melalui digitalisasi berpotensi menjadi katalisator dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, teori akses keuangan menjadi landasan yang relevan dalam menganalisis sejauh mana layanan keuangan digital mampu membuka jalan bagi pelaku UMKM untuk terhubung dengan sistem keuangan formal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka.

2.1.7 Teori Literasi Keuangan

Teori literasi keuangan menyatakan bahwa kemampuan seseorang atau pengusaha untuk memahami, menangani, dan membuat pilihan keuangan yang bijak sangat penting untuk kesuksesan dalam mengatur keuangan dan performa bisnis (Lusardi & Mitchell, 2014). Literasi finansial melibatkan pemahaman, kemahiran, dan perilaku keuangan yang membantu individu menguasai prinsip-prinsip dasar keuangan, seperti menyusun rencana keuangan, mengatur aliran dana, menabung, berinvestasi, serta menangani risiko (OECD, 2016).

1. Pengertian Literasi Keuangan

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 dan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (*Revisit* 2017), literasi keuangan merujuk pada kemampuan yang terbentuk dari pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan seseorang dalam mengelola keuangan. Kemampuan tersebut tercermin melalui sikap dan perilaku dalam menentukan pilihan serta mengambil keputusan keuangan secara tepat. Pengelolaan keuangan yang baik pada akhirnya dapat membantu seseorang mencapai kondisi kesejahteraan yang lebih baik. Masyarakat yang memiliki pemahaman keuangan yang baik umumnya lebih mampu menggunakan sumber daya keuangan secara efektif untuk mendukung kegiatan ekonomi yang produktif (Soetino & Setiawan, 2018).

Literasi keuangan pada dasarnya memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar memahami informasi mengenai keuangan. Literasi ini juga berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengatur keuangan, menentukan prioritas, serta memilih keputusan yang sesuai dengan kondisi finansialnya. Oleh

sebab itu, literasi keuangan dapat dipandang sebagai kemampuan untuk memahami dan mengelola berbagai aspek keuangan secara bertanggung jawab. Bagi pelaku usaha, kemampuan tersebut penting karena dapat membantu dalam menentukan keputusan keuangan, mengelola kegiatan usaha, meningkatkan hasil usaha, serta mendukung tercapainya kondisi finansial yang lebih baik.

2. Tingkat Literasi Keuangan

Pengukuran tingkat literasi keuangan diperlukan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami produk, layanan, dan pengelolaan keuangan. Informasi mengenai kondisi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan bentuk edukasi keuangan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, hasil pemetaan literasi keuangan dapat dimanfaatkan untuk menilai keberhasilan program edukasi yang telah dilaksanakan sekaligus membantu lembaga keuangan dalam menyesuaikan produk dan layanan dengan kemampuan masyarakat (Soetiono & Setiawan, 2018).

Sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan akses masyarakat terhadap sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan OJK Nomor 76 Tahun 2016. Ketentuan tersebut mengatur pentingnya pelaksanaan edukasi keuangan serta penyediaan produk dan layanan yang mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Perhatian juga diberikan kepada kelompok masyarakat yang masih memiliki keterbatasan dalam memperoleh akses terhadap layanan keuangan. Jenis layanan yang tercakup antara lain sektor perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, pergadaian, serta dana pensiun (OJK, 2016).

2.1.8 Jumlah Tenaga Kerja

A. Pengertian Jumlah Tenaga Kerja

Tenaga kerja menjadi salah satu unsur yang diperlukan dalam proses produksi dan memiliki kontribusi terhadap berlangsungnya aktivitas ekonomi, termasuk pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Secara umum, tenaga kerja merujuk pada orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang maupun jasa. Dalam suatu usaha,

jumlah tenaga kerja menunjukkan banyaknya orang yang ikut menjalankan pekerjaan dan aktivitas usaha pada periode tertentu (UU No. 13 Tahun 2003).

Keberadaan tenaga kerja tidak semata-mata dilihat dari jumlah pekerja yang dimiliki, tetapi juga dari peran sumber daya manusia dalam menjalankan proses usaha. Individu yang berada pada usia produktif serta memiliki kemampuan untuk bekerja dapat menghasilkan barang atau jasa yang mempunyai nilai ekonomi dan memberikan pendapatan. Dalam kegiatan produksi, tenaga kerja juga berfungsi sebagai pihak yang mengatur serta mengombinasikan berbagai input, seperti modal, bahan baku, dan teknologi, agar dapat digunakan dalam proses produksi secara optimal (Sukirno, 2016; Simanjuntak, 2018).

Dengan demikian, jumlah tenaga kerja dapat digunakan untuk menunjukkan banyaknya orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan usaha, baik pada bagian produksi maupun operasional. Semakin tersedianya sumber daya manusia yang dibutuhkan, semakin besar pula dukungan yang dapat diberikan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian tujuan usaha. Oleh karena itu, tenaga kerja merupakan salah satu komponen yang perlu dikelola dengan baik untuk menunjang kegiatan dan perkembangan UMKM (Sukirno, 2016; Simanjuntak, 2018).

B. Peran Jumlah Tenaga Kerja dalam Usaha

Jumlah tenaga kerja yang tersedia dalam suatu usaha menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi kemampuan produksi serta efisiensi kegiatan usaha. Penambahan tenaga kerja berpotensi meningkatkan jumlah output yang dihasilkan apabila didukung oleh kompetensi, keterampilan, dan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Pada sektor UMKM, peran tenaga kerja tidak hanya terbatas pada pelaksanaan kegiatan operasional, tetapi juga mencakup aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan usaha, seperti menciptakan inovasi, melakukan pemasaran, dan memberikan pelayanan kepada konsumen (Todaro dan Smith, 2015).

Ketersediaan tenaga kerja dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan usaha juga dapat mendukung peningkatan produktivitas. Pemanfaatan tenaga kerja secara efektif memungkinkan kegiatan produksi dan pelayanan dilakukan dengan

lebih optimal sehingga kapasitas usaha dapat meningkat. Sebaliknya, apabila jumlah tenaga kerja yang digunakan melebihi kebutuhan kegiatan usaha, kondisi tersebut dapat menyebabkan penggunaan sumber daya menjadi kurang efisien dan meningkatkan beban biaya tenaga kerja. Oleh karena itu, penentuan jumlah tenaga kerja perlu disesuaikan dengan kapasitas produksi dan kebutuhan operasional usaha agar efisiensi dapat tetap terjaga (Hasibuan, 2019).

C. Hubungan Jumlah Tenaga Kerja dengan Kinerja UMKM

Dalam penelitian mengenai pengaruh inklusi keuangan digital terhadap kinerja UMKM, jumlah tenaga kerja dapat digunakan sebagai indikator yang mencerminkan skala dan kapasitas usaha. Jumlah tenaga kerja yang memadai dapat membantu UMKM menjalankan kegiatan operasional secara lebih optimal (Tambunan, 2020). Semakin optimal pemanfaatan tenaga kerja, semakin besar peluang UMKM dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing. Selain itu, penggunaan layanan keuangan digital dapat membantu mempercepat berbagai aktivitas usaha sehingga mendukung efisiensi kerja dan pengelolaan operasional UMKM (Tambunan, 2020).

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Tenaga Kerja

Beberapa faktor yang memengaruhi jumlah tenaga kerja dalam suatu usaha antara lain:

- 1) Skala Usaha – Semakin besar skala usaha, semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas produksi dan distribusi (Sukirno, 2016).
- 2) Kemajuan Teknologi – Penggunaan teknologi digital dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual, tetapi meningkatkan kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan khusus (Simanjuntak, 2018).
- 3) Modal dan Investasi – Ketersediaan modal memungkinkan pengusaha untuk memperluas kegiatan usaha dan menambah jumlah tenaga kerja (Todaro & Smith, 2015).
- 4) Produktivitas dan Efisiensi – Usaha dengan produktivitas tinggi cenderung membutuhkan tenaga kerja yang proporsional dengan output yang dihasilkan.

2.1.9 Indikator Kinerja UMKM

Kinerja UMKM menunjukkan tingkat keberhasilan suatu usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja dapat dilihat dari aspek keuangan maupun non-keuangan serta dipengaruhi oleh kondisi internal dan lingkungan eksternal usaha. Secara umum, kinerja menggambarkan kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan tanggung jawab yang dimiliki (Gibson et al., 1997; Mahmood & Hanafi, 2013). Dalam UMKM, kinerja usaha tidak hanya diukur melalui aspek finansial, tetapi juga melalui perkembangan pelanggan, perluasan pasar, efisiensi operasional, kepuasan konsumen, serta kemampuan usaha dalam mempertahankan dan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan bisnis. Oleh karena itu, pengukuran kinerja UMKM perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang menunjukkan perkembangan dan keberlanjutan usaha (Mahmood & Hanafi, 2013).

Kinerja UMKM dapat dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kualitas sumber daya manusia, kemampuan manajemen, inovasi, dan pemanfaatan teknologi, serta faktor eksternal berupa kebijakan pemerintah, akses pembiayaan, dan perkembangan teknologi keuangan. Dalam perkembangan ekonomi digital, pemanfaatan layanan keuangan digital dapat membantu UMKM meningkatkan efisiensi transaksi, pengelolaan keuangan, dan daya saing usaha. Dengan demikian, semakin optimal pemanfaatan layanan keuangan digital, semakin besar peluang UMKM dalam meningkatkan kinerja usahanya (Mahmood & Hanafi, 2013).

2.2 Penelitian Terdahulu

Amini, Wiralaga, dan Sebayang (2025) menjalankan sebuah studi dengan judul *"Pengaruh Literasi Keuangan, Penggunaan Digital Payment, dan Pendapatan terhadap Inklusi Keuangan di DKI Jakarta"* yang bertujuan menyelidiki bagaimana tingkat pemahaman keuangan, frekuensi pemanfaatan pembayaran digital, serta penghasilan memengaruhi partisipasi masyarakat dalam layanan keuangan di wilayah DKI Jakarta. Studi ini menerapkan metode kuantitatif melalui survei pada 157 responden usia 15 hingga 59 tahun yang aktif

menggunakan layanan pembayaran digital, dengan pemilihan sampel secara purposive. Pengolahan data dilakukan lewat analisis regresi linier berganda menggunakan software SPSS. Temuan studi mengungkapkan bahwa pemahaman keuangan, pemanfaatan pembayaran digital, dan penghasilan secara individu memberikan dampak positif yang bermakna terhadap partisipasi keuangan. Angka koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,588 menunjukkan bahwa 58,8 persen variasi partisipasi keuangan dapat dijelaskan oleh ketiga faktor tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh elemen lain di luar model. Kesimpulan ini menegaskan bahwa meningkatkan pemahaman keuangan dan memanfaatkan layanan pembayaran digital sangat krusial untuk mendorong partisipasi keuangan di lingkungan urban, khususnya melalui kemudahan dan efisiensi transaksi harian.

Studi berikutnya oleh Rahmahtika, Husni, dan Adrianto (2025) berjudul *"Pengaruh Digital Literacy dan Financial Technology terhadap Inklusi Keuangan Digital pada UKM Food and Beverage di Kota Padang"* bertujuan mengkaji dampak kemampuan literasi digital serta teknologi finansial yang meliputi pembayaran tanpa tunai, agregator pasar, serta pengelolaan risiko dan investasi terhadap partisipasi keuangan digital pada usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor makanan dan minuman. Pendekatan yang diterapkan adalah kuantitatif dengan survei terhadap 77 pelaku UMKM yang dipilih melalui sampling purposive. Analisis data menggunakan *Structural Equation Modeling (SEM)* dengan bantuan SmartPLS versi 4.0. Hasil studi menunjukkan bahwa pembayaran tanpa tunai, agregator pasar, serta pengelolaan risiko dan investasi memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap partisipasi keuangan digital, sementara literasi digital tidak menunjukkan dampak yang bermakna. Nilai R-Square sebesar 0,651 mengindikasikan bahwa 65,1 persen variasi partisipasi keuangan digital dapat dijelaskan oleh keempat variabel tersebut. Temuan ini menyiratkan bahwa ketersediaan layanan dan kemudahan akses teknologi finansial lebih berperan dominan dalam meningkatkan partisipasi keuangan digital UMKM dibandingkan dengan tingkat kemampuan literasi digital para pelaku usaha.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriah dan Ichwanudin (2020) dengan judul *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inklusi Keuangan (Studi pada*

Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)" bertujuan mengevaluasi pengaruh pemahaman keuangan, pengetahuan keuangan, keterampilan keuangan, kepercayaan keuangan, sikap keuangan, dan perilaku keuangan terhadap tingkat partisipasi keuangan. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei, dengan seluruh populasi sebanyak 73 mahasiswa magister manajemen sebagai sampel melalui metode sensus. Analisis data dilakukan dengan SEM menggunakan SmartPLS versi 3.0. Hasil studi mengungkapkan bahwa pemahaman keuangan, pengetahuan keuangan, dan sikap keuangan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap partisipasi keuangan. Di sisi lain, keterampilan keuangan dan kepercayaan keuangan menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan, sedangkan perilaku keuangan ditemukan memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap partisipasi keuangan. Nilai R-Square sebesar 0,705 menunjukkan bahwa 70,5 persen variasi partisipasi keuangan dapat dijelaskan oleh semua variabel independen yang diteliti. Studi ini menyimpulkan bahwa peningkatan pemahaman, pengetahuan, serta sikap keuangan merupakan elemen kunci untuk mendorong partisipasi keuangan, sementara beberapa pola perilaku keuangan bisa menjadi hambatan dalam penggunaan layanan keuangan formal.

Tabel 2.2 Rangkuman Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Wardi Ismail (2024)	Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kota Ternate	X1: Inklusi Keuangan X2: Literasi Keuangan Y: Kinerja UMKM	Inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh terhadap kinerja UMKM dengan nilai R ² sebesar 19,4%.

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
2	Haris Adiki & Eigis Yani Pramularso (2023)	Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kelurahan Tapos Kota Depok	X1: Inklusi KeuanganX2: Literasi KeuanganY: Kinerja UMKM	Inklusi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh dengan nilai R ² sebesar 0,555.
3	Heliani & Salwa Aulia Novitasari (2024)	Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Finansial Teknologi terhadap Kinerja UMKM di Kota Sukabumi	X1: Literasi KeuanganX2: Inklusi KeuanganX3: Finansial TeknologiY: Kinerja UMKM	Literasi keuangan, inklusi keuangan, dan finansial teknologi masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Ketiga variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM.
4	Lydia Dumaria Sihombing & Putu Riesty Masdiantini (2025)	Pengaruh Financial Technology, Literasi Keuangan, dan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Badung	X1: Financial TechnologyX2: Literasi KeuanganX3: Inklusi KeuanganY: Kinerja UMKM	Financial technology, literasi keuangan, dan inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Nilai Adjusted R ² sebesar 0,620 menunjukkan 62% variasi kinerja UMKM dijelaskan oleh ketiga variabel independen.

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5	Gita Mai Rani & Rika Desiyanti (2024)	Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Digital Payment terhadap Kinerja UMKM Makanan dan Minuman di Kota Padang	X1: Literasi Keuangan X2: Inklusi Keuangan X3: Digital Payment Y: Kinerja UMKM	Literasi keuangan dan inklusi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Digital payment berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM.

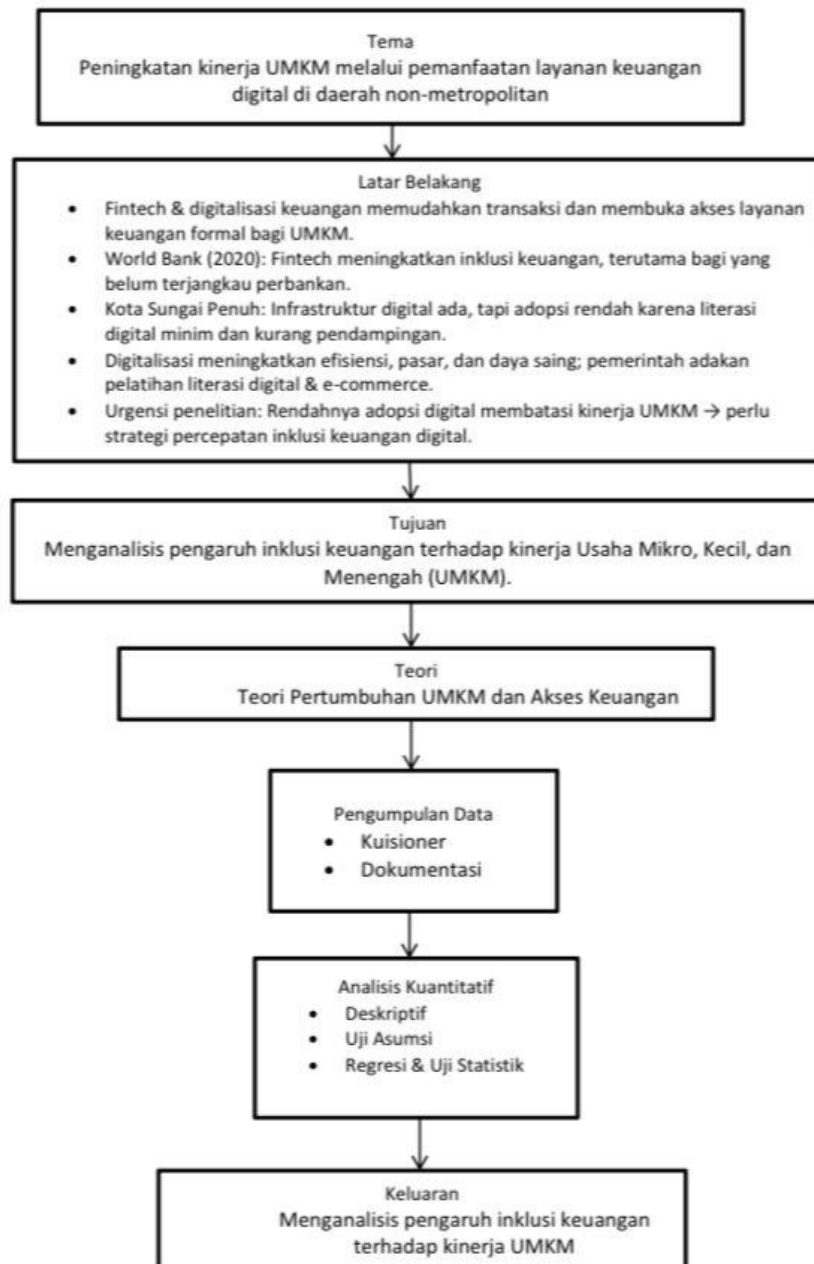
Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dirancang untuk menyelidiki bagaimana partisipasi keuangan digital memengaruhi performa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Sungai Penuh, yang diklasifikasikan sebagai daerah non-metropolitan. Di sini, partisipasi keuangan digital didefinisikan sebagai kemampuan pengusaha UMKM untuk mengakses dan menggunakan layanan keuangan yang berbasis teknologi digital, mencakup aspek kepemilikan serta pemanfaatan layanan tersebut, tingkat kemudahan dalam mengaksesnya, keamanan saat melakukan transaksi, dan mutu layanan yang diperoleh.

Performa UMKM dievaluasi berdasarkan indikator penting seperti naiknya penghasilan bisnis, peningkatan volume penjualan, bertambahnya jumlah karyawan, serta kelangsungan operasional usaha. Dari segi konseptual, partisipasi keuangan digital diharapkan bisa memperbaiki efisiensi dalam menangani urusan keuangan, memperluas jangkauan terhadap sumber dana, dan membuka kesempatan pasar yang lebih besar, yang akhirnya berdampak baik pada performa UMKM. Data dikumpulkan lewat distribusi angket dan pengumpulan dokumen pendukung, kemudian diolah dengan metode kuantitatif. Teknik analisis yang diterapkan mencakup evaluasi deskriptif, verifikasi asumsi klasik, serta penerapan regresi dan pengujian statistik. Kerangka studi ini disusun untuk menguraikan alur

pemikiran secara terstruktur, seperti yang divisualisasikan dalam Gambar 2.1, yang mengilustrasikan keterkaitan antara partisipasi keuangan digital dan performa UMKM serta langkah-langkah analisis yang dilakukan dalam penelitian.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025